

Praktik Distribusi Bantuan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Warga Kecamatan Gubeng Surabaya)

Muhammad Taufiqurrohman^{1*}, Pambudi Handoyo²

^{1,2} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Penulis Korespondensi: muhammadtaufiqurrohman.20056@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Social assistance (Bansos) programs are vital government policy instruments aimed at reducing poverty and social inequality. However, their implementation is often characterized by politicization and significant targeting problems, particularly the Exclusion Error. This study aims to analyze the practice of Bansos distribution in the Gubeng Kertajaya 5D community, identify the objective conditions of the residents, and the actors involved. This research employs a qualitative method with a case study approach in Gubeng Sub-district, Surabaya. The theoretical framework utilized is Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice, focusing on the concepts of Habitus, Capital, and Field, combined with Poverty Theory. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The main findings reveal a significant Exclusion Error, where the most vulnerable poor residents—such as elderly widows, informal sector workers (scavengers/pedicab drivers), and families with chronic illness/special needs dependents—are not registered as recipients of Bansos (PKH/BPNT) or the National Health Insurance (BPJS-PBI). Bansos distribution practices are also characterized by political and clientelistic nuances, evidenced by the temporal nature of the aid that often appears around election periods. Sociologically, this condition shapes a Poor Habitus marked by fatalistic dispositions, where social assistance is perceived as 'fortune' (rezeki) or 'pity' (belas kasihan), rather than a fundamental social right of a citizen. The study concludes that this distribution failure stems from blind spots in the local data verification mechanism and a lack of systematic data integration between the Social Services and Health Services. It is recommended that the data collection mechanism be reformed through proactive outreach and inter-agency data integration to ensure dual protection for vulnerable groups.

Keywords: Social Assistance; Exclusion Error; Politicization; Social Practice; Poor Habitus

Abstrak. Program bantuan sosial (Bansos) merupakan instrumen kebijakan vital pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, pelaksanaannya di lapangan seringkali diwarnai oleh fenomena politisasi dan masalah ketidaktepatan sasaran (*targeting*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi Bansos di masyarakat Gubeng Kertajaya 5D, mengidentifikasi kondisi objektif masyarakat, dan aktor-aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu, dengan fokus pada konsep Habitus, Modal, dan Bidang, dikombinasikan dengan Teori Kemiskinan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan utama menunjukkan adanya Exclusion Error yang signifikan, di mana warga miskin yang paling rentan seperti lansia janda, pekerja sektor informal (pemulung/tukang becak), dan keluarga dengan tanggungan sakit kronis/berkebutuhan khusus justru tidak terdaftar sebagai penerima Bansos (PKH/BPNT) dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-PBI). Praktik distribusi Bansos juga diwarnai nuansa politis dan klientelisme, yang terlihat dari bantuan yang bersifat temporal dan muncul menjelang Pemilu. Secara sosiologis, kondisi ini membentuk Habitus Miskin yang ditandai oleh disposisi fatalistik, di mana Bansos dipandang sebagai 'rezeki' atau 'belas kasihan', alih-alih sebagai hak sosial warga negara. Penelitian menyimpulkan bahwa kegagalan distribusi ini berakar pada titik buta mekanisme verifikasi data di tingkat lokal dan ketiadaan integrasi data yang sistematis antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Disarankan adanya reformasi mekanisme pendataan melalui *proactive outreach* dan integrasi data antar-dinas untuk memastikan perlindungan ganda bagi kelompok rentan.

Kata kunci: Bantuan Sosial; *Exclusion Error*; Politisasi; Praktik Sosial; Habitus Miskin

1. LATAR BELAKANG

Bantuan sosial, juga dikenal sebagai bansos, adalah alat kebijakan penting yang digunakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sejak era reformasi, program bansos telah menjadi bagian penting dari rencana pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, terlepas dari pergeseran politik yang rumit, program bansos seringkali tidak dilaksanakan. Mengingat pengaruh besar bansos pada persepsi publik, legitimasi pemerintah, dan keberhasilan program itu sendiri, sentimen politik terhadap distribusi bansos menarik untuk dipelajari. Dalam latar belakang ini, peneliti akan memeriksa berbagai elemen yang membentuk persepsi politik tentang bansos di Indonesia. Ini termasuk sejarah program bansos, kesulitan yang dihadapinya, pengaruh pada pemilihan, peran media dan opini publik, serta konsekuensi kebijakan yang lebih luas. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti adalah adanya praktik politisasi pada distribusi bantuan sosial masyarakat. Bansos juga memiliki mekanisme dan regulasi yang mengaturnya. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai: Regulasi ini mengatur penyaluran bansos melalui sistem perbankan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi. Bansos disalurkan ke rekening penerima atau melalui uang elektronik. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan: Mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bansos bersyarat untuk keluarga miskin. Mencakup kriteria penerima, besaran bantuan, dan mekanisme penyaluran. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga: Mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bansos yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Di Indonesia, program bantuan sosial memiliki sejarah yang panjang. Namun, selama krisis ekonomi 1997-1998 dan reformasi yang mengikutinya, bentuk modern dari program bansos mulai muncul. Era Orde Baru dan Krisis Ekonomi 1997–1998: Selama era Orde Baru, kebijakan sosial pemerintah berpusat pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, percaya bahwa hal itu akan membantu orang miskin dengan "menetes ke bawah". Namun, krisis ekonomi 1997-1998 menunjukkan

kelemahan metode ini dan memaksa pemerintah untuk menggunakan strategi perlindungan sosial yang lebih langsung (Sumarto, Suryahadi, & Bazzi, 2008). Dalam hal pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, era reformasi membawa perubahan besar. Desain dan pelaksanaan program bansos juga dipengaruhi oleh desentralisasi wewenang ke pemerintah daerah. Program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) muncul sebagai tanggapan terhadap krisis (Perdana, 2014). Indonesia telah meluncurkan berbagai program bansos yang lebih terorganisir sejak awal tahun 2000-an. Beberapa di antaranya adalah; Program Keluarga Harapan (PKH): bantuan tunai bersyarat yang dimulai pada tahun 2007. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Ditawarkan sebagai ganti rugi atas kenaikan harga BBM. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS): Program yang menawarkan bantuan pendidikan dan kesehatan di bawah pemerintahan Joko Widodo. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial di Indonesia telah berubah ke arah sistem yang lebih luas dan terintegrasi (Bank, 2017). Program bansos telah berkembang pesat, tetapi ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya yang memengaruhi sikap politik masyarakat. Ketepatan target dalam distribusi bansos merupakan salah satu tantangan utama. Kesalahan dalam penargetan dapat menyebabkan exclusion error (penerima yang berhak tidak menerima bantuan) atau inclusion error (penerima yang tidak berhak menerima bantuan). Masalah ini sering kali menjadi sumber kritik dan ketidakpuasan masyarakat (Hanna & Olken, 2018). Kasus korupsi dan penyalahgunaan bansos telah merusak kepercayaan publik. Skandal seperti kasus korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan pejabat tinggi telah menimbulkan opini negatif terhadap program bansos secara keseluruhan (KPK, 2021). Seringkali, keberhasilan program bansos terhambat oleh keterbatasan kapasitas administratif, terutama di tingkat daerah. Ini dapat menyebabkan distribusi yang tertunda, kesalahan data, dan masalah lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat (Kwon & Kim, 2015). Program bansos yang kompleks melibatkan banyak kementerian dan lembaga pemerintah, jadi koordinasi yang baik diperlukan. Jika tidak, ini dapat menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan kebingungan masyarakat (SMERU Research Institute, 2020). Pengaruh Politik Elektoral terhadap Distribusi Bansos Beberapa hal yang harus dipertimbangkan termasuk; Politisasi Bansos, Baik politisi maupun partai politik cenderung menggunakan program bansos sebagai alat kampanye atau untuk mendapatkan dukungan politik. Tindakan ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat tentang

keadilan dan netralitas distribusi bansos (Aspinall & Sukmajati, 2016). Alokasi dan distribusi bansos meningkat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Fenomena yang disebut sebagai "putaran anggaran politik" ini berpotensi berdampak negatif pada keberhasilan program bansos dalam jangka panjang (Sjahrir, Kis-Katos, & Schulze, 2013). Mekanisme distribusi bansos dapat dipengaruhi oleh sistem patronase politik yang masih kuat di beberapa wilayah Indonesia. Jaringan klientelisme politik seringkali digunakan untuk memengaruhi alokasi bantuan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat (Aspinall & Berenschot, 2019). Media massa dan media sosial memengaruhi sentimen politik terhadap distribusi bansos. Persepsi publik tentang program pemerintah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pemberitaan media tentang penyimpangan atau keberhasilan program bansos. Misalnya, investigasi media yang mengungkap kasus korupsi bansos telah menyebabkan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap program pemerintah (Tapsell, 2021). Media sosial telah menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik tentang bansos. Informasi yang menyesatkan atau akurat dapat dengan cepat memengaruhi perasaan masyarakat (Lim, 2017). Persepsi publik tentang program bansos dipengaruhi oleh kisah yang diceritakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan oposisi (Mietzner, 2020). Masa depan program perlindungan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sentimen politik terhadap distribusi bansos. Pemerintah telah berusaha mengubah sistem distribusi bansos untuk menanggapi kritik dan komentar negatif. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, inisiatif seperti penggunaan teknologi digital untuk memverifikasi penerima bantuan dan transfer langsung ke rekening bank penerima (Kementerian Sosial RI, 2022). Pengembangan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (SDTKS) adalah langkah penting untuk mengatasi masalah targeting dan meningkatkan kepercayaan publik dengan meningkatkan akurasi data penerima bantuan (TNP2K, 2021). Perdebatan tentang seberapa banyak desentralisasi yang ideal untuk mengelola program bansos masih berlanjut. Meskipun desentralisasi dapat membantu memenuhi kebutuhan lokal, ia juga dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan politik di tingkat daerah (Lewis, 2017). Penggabungan berbagai program bansos ke dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas dapat mengurangi duplikasi dan meningkatkan produktivitas. Namun, untuk melakukannya, diperlukan kerja sama

yang kuat di semua tingkat pemerintahan dan lembaga (World Bank, 2020). Di Indonesia, faktor-faktor historis, institusional, politik, dan sosial memengaruhi persepsi politik tentang distribusi bantuan sosial. Program bansos telah menjadi bagian penting dari strategi perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menjadi subjek perdebatan politik dan pemeriksaan publik. Pembuat kebijakan menghadapi tantangan utama untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang bertahan lama dan efektif dengan tuntutan untuk mengatasi perubahan politik dalam jangka pendek. Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi distribusi bansos akan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan mengurangi opini negatif. Bagaimana sentimen politik terhadap distribusi bansos akan berubah ke depan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah mengatasi masalah saat ini, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi, dan mencapai kesepakatan politik yang lebih besar. Permasalahan distribusi bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Gubeng bukan sekadar persoalan teknis-administratif mengenai akurasi data, melainkan mencerminkan adanya *legal gap* yang dalam antara *law in the books* dan *law in action*. Secara normatif, berbagai regulasi seperti Permensos No. 1 Tahun 2018 memosisikan bansos sebagai hak sosial warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut seringkali terdistorsi menjadi 'belas kasihan' atau instrumen patronase politik. Secara kultural, fenomena ini melahirkan konstruksi makna di masyarakat miskin yang memandang bansos sebagai 'rezeki' temporal, yang pada gilirannya melemahkan kesadaran hukum (*legal consciousness*) mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Praktik Sosial

Teori praktik sosial Pierre Bourdieu adalah salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam sosiologi dan ilmu sosial. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana individu beroperasi dalam struktur sosial yang lebih besar, serta bagaimana struktur tersebut membentuk praktik sosial sehari-hari. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari teori praktik sosial Bourdieu:

Habitus

Habitus adalah sistem disposisi yang diperoleh individu melalui pengalaman sosial,

yang membentuk cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Habitus mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang dipelajari dari lingkungan sosial dan budaya. Ini adalah cara individu beradaptasi dengan dunia sosial dan berinteraksi dengan struktur yang ada.

Ciri-ciri Habitus adalah Tidak bersifat sadar; sering kali individu tidak menyadari bagaimana habitus mereka memengaruhi perilaku, serta Berubah seiring waktu, tetapi juga dapat menjadi stabil, menciptakan kontinuitas dalam perilaku individu.

Modal (Capital)

Bourdieu memperkenalkan berbagai bentuk modal yang memengaruhi posisi individu dalam struktur sosial. Ada tiga bentuk modal utama, yaitu modal ekonomi, kultural, dan sosial. Modal Ekonomi Merujuk pada sumber daya ekonomi, seperti uang dan aset. Modal Kultural Meliputi pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan yang diakumulasi oleh individu. Ini juga mencakup pengakuan sosial yang diperoleh melalui pencapaian budaya. Modal Sosial Jaringan relasi sosial yang dimiliki individu, termasuk hubungan yang dapat memberikan akses kepada sumber daya dan peluang.

Bidang (Field)

Bourdieu menggunakan istilah "bidang" untuk menggambarkan arena sosial yang berbeda di mana praktik sosial terjadi (misalnya, bidang pendidikan, bidang politik, bidang seni). Setiap bidang memiliki aturan dan struktur kekuasaan yang unik, serta hubungan antar individu yang berpartisipasi di dalamnya.

Ciri-ciri Bidang adalah Dinamis dan selalu berubah, tergantung pada interaksi antara individu dan kekuatan yang beroperasi di dalamnya. Individu berusaha untuk memperbaiki posisi mereka di dalam bidang tersebut dengan menggunakan modal yang mereka miliki.

Praktik Sosial

Praktik sosial adalah tindakan yang diambil individu dalam konteks habitus dan bidang. Praktik ini mencerminkan interaksi antara struktur sosial dan agen individu. Bourdieu berargumen bahwa praktik sosial bukan hanya hasil dari pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih besar.

Refleksivitas

Bourdieu juga menekankan pentingnya refleksivitas dalam memahami praktik sosial. Ia berpendapat bahwa individu harus dapat melihat dan menganalisis bagaimana

habitus dan modal mereka memengaruhi tindakan dan posisi mereka dalam bidang tertentu.

Teori praktik sosial Bourdieu menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu beroperasi dalam konteks sosial yang lebih besar. Dengan menghubungkan habitus, modal, dan bidang, Bourdieu menunjukkan bahwa praktik sosial adalah hasil dari interaksi antara struktur dan agen, yang menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Teori ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, antropologi, pendidikan, dan kajian budaya. Dalam konteks penelitian ini, **Habitus** dipahami sebagai disposisi kultural yang terbentuk dari pengalaman kemiskinan panjang, yang oleh Bourdieu disebut sebagai *amor fati*—mencintai nasib. Habitus ini bermanifestasi dalam rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana mereka menerima eksklusi data (*exclusion error*) sebagai takdir, bukan sebagai pelanggaran hak hukum. Sementara itu, **Modal Simbolik** dalam distribusi bansos digunakan oleh aktor politik untuk mengonversi bantuan material menjadi citra 'dermawan', yang menciptakan hubungan hutang budi kultural di masyarakat.

B. Teori Kemiskinan

Dalam sosiologi, kemiskinan dipahami sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan Absolut Merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Ini sering kali diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

Kemiskinan Relatif Berfokus pada ketidakmampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakatnya karena kurangnya sumber daya dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya.

Aspek Struktural

Faktor Ekonomi: Kemiskinan sering kali terkait dengan ketidakadilan ekonomi, di mana kekayaan dan sumber daya terdistribusi secara tidak merata. Struktur pasar kerja, kebijakan ekonomi, dan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan juga berkontribusi pada kemiskinan.

Faktor Sosial: Lingkungan sosial dan budaya juga mempengaruhi kemiskinan. Diskriminasi, stigma sosial, dan akses yang terbatas terhadap jaringan sosial dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Dimensi Budaya

Nilai dan Norma: Pandangan budaya tentang kemiskinan, seperti stigma terhadap orang miskin, dapat mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan mereka. Beberapa masyarakat mungkin melihat kemiskinan sebagai akibat dari kegagalan individu, sementara yang lain mungkin memahami kemiskinan sebagai hasil dari faktor struktural yang lebih luas.

Kepuasan dan Resiliensi: Dalam beberapa konteks, masyarakat miskin mungkin mengembangkan mekanisme koping atau resiliensi untuk bertahan dalam kondisi sulit, yang dapat menciptakan nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dari masyarakat yang lebih kaya.

Dampak Kemiskinan

Kesehatan: Kemiskinan sering kali berhubungan dengan kondisi kesehatan yang buruk, termasuk akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dan nutrisi yang tidak memadai.

Pendidikan: Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan sering kali memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas, yang berkontribusi pada siklus kemiskinan antargenerasi.

Partisipasi Sosial dan Politik: Orang miskin sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka.

Dalam analisis sosiologis, kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara individu, masyarakat, dan struktur sosial yang lebih luas. Pemahaman yang mendalam tentang kemiskinan memerlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek ekonomi, politik, budaya, dan sejarah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki beberapa kriteria dan ciri-ciri yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan.

Berikut adalah ciri-ciri kemiskinan menurut BPS: 1) Pendapatan di Bawah Garis Kemiskinan; 2) Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Dasar; 3) Kondisi Tempat Tinggal; 4) Pekerjaan Tidak Stabil; 5) Ketidakberdayaan Ekonomi; dan 6) Isolasi Sosial.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan perspektif teori modal sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya selama 3 bulan. Subjek penelitian ini adalah warga Gubeng Kertajaya Surabaya. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bidang (Field) Distribusi Bantuan Sosial di Kecamatan Gubeng

Bidang, dalam terminologi Bourdieu, merujuk pada ruang sosial terstruktur yang relatif otonom, sebuah arena di mana para agen berinteraksi, berjuang, dan bersaing memperebutkan modal yang dipertaruhkan dalam arena tersebut. Bidang distribusi Bansos di Gubeng dianalisis sebagai arena **perjuangan simbolik dan material** yang dibentuk oleh kondisi kemiskinan struktural dan intervensi politik.

Struktur Kemiskinan sebagai Kondisi Objektif Bidang

1) Dimensi Struktural Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi

Kecamatan Gubeng, khususnya pada kelurahan dan wilayah RT/RW yang menjadi lokasi studi, merefleksikan sebuah Bidang yang dikarakterisasi oleh **kerentanan ekonomi yang akut**. Data penelitian dan observasi menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga penerima manfaat Bansos bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pemulung, atau pedagang kecil. Struktur pekerjaan yang tidak stabil ini mengakibatkan minimnya jaminan sosial dan fluktuasi pendapatan yang tinggi.

Kondisi obyektif ini secara sosiologis memposisikan warga sebagai kelompok yang **subordinat** dan **marginal** dalam struktur sosial-ekonomi kota Surabaya. Kerentanan yang kronis ini secara esensial menciptakan *power imbalance* yang masif dalam Bidang. Bagi warga miskin, Bansos bukanlah sekadar bantuan tambahan, tetapi merupakan

sumber daya vital yang menentukan kelangsungan hidup mereka (survival). Ketergantungan struktural ini, yang diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan jaring pengaman yang komprehensif, menjadi fondasi di mana **praktik patronase** dapat tumbuh subur. Warga berada dalam posisi terpaksa menerima *rules of the game* (aturan main) yang dibentuk oleh aktor yang lebih kuat, yaitu aktor politik atau perantara yang mengontrol akses ke sumber daya.

2) Batasan Akses dan Dominasi Aktor Perantara

Bidang distribusi Bansos di Gubeng juga didefinisikan oleh keberadaan **aktor-aktor perantara** yang memainkan peran sentral sebagai *gatekeeper*. Aktor perantara ini meliputi tokoh masyarakat, pengurus lingkungan (RT/RW), dan individu yang secara eksplisit berafiliasi dengan partai politik lokal. Aktor-aktor ini memiliki akses dan kontrol terhadap **Modal Politik** dan **Modal Sosial** yang signifikan.

Data menunjukkan bahwa aktor-aktor ini tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, melainkan turut serta dalam **proses identifikasi dan validasi** penerima. Proses ini, yang secara formal harusnya bersifat administratif dan non-partisan, mengalami distorsi. Aktor perantara sering menggunakan pengaruh mereka untuk memprioritaskan individu atau keluarga yang dianggap memiliki **loyalitas politik** atau **utang budi** kepada mereka. Dengan demikian, Bidang distribusi telah terkontaminasi oleh logika politik elektoral, mengubahnya menjadi arena perebutan loyalitas di mana Bansos berfungsi sebagai **umpan material** untuk dukungan non-material.

Bidang Distribusi sebagai Arena Politisasi dan Perjuangan

Fenomena politisasi Bansos di Gubeng merupakan bukti kuat bahwa Bidang ini tidak lagi otonom dari Bidang Politik. Politisasi ini terwujud dalam dua bentuk utama: **klientelisme** dan **eksklusi selektif**.

1) Manifestasi Klientelisme dalam Praktik Distribusi

Praktik **klientelisme** muncul sebagai **Praktik Sosial** yang dominan. Klientelisme terjadi ketika Bansos didistribusikan dengan penekanan simbolik bahwa bantuan tersebut berasal dari inisiatif politisi atau partai tertentu, bukan murni dari anggaran negara yang bersifat universal. Dalam wawancara, beberapa warga menyebutkan bahwa "*sembako yang diterima seringkali disertai stiker atau label dari calon legislatif tertentu*".

Praktik ini merupakan upaya sistematis untuk menciptakan **kewajiban resiprokal** (timbang balik). Aktor politik berupaya mengonversi **Modal Ekonomi** (nilai material Bansos) menjadi **Modal Simbolik** (citra dermawan, peduli, dan pahlawan) yang pada akhirnya dipertukarkan menjadi **Modal Politik** (suara atau dukungan pada pemilihan berikutnya). Ini adalah strategi rasional bagi politisi untuk mengamankan basis massa, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Bidang tersebut kemudian menjadi tempat di mana **nilai guna (Bansos)** ditukar dengan **nilai simbolik (loyalitas)**.

2) Eksklusi Selektif dan Mekanisme Kekuasaan

Temuan mengenai adanya warga yang miskin tetapi tidak terdaftar atau tidak menerima Bansos karena diketahui memiliki afiliasi politik yang berbeda memperkuat pandangan bahwa Bidang ini dikendalikan oleh mekanisme kekuasaan yang selektif. Eksklusi selektif ini adalah **sanksi tidak tertulis** yang dikenakan oleh aktor perantara atau *gatekeeper* terhadap warga yang tidak sejalan.

Mekanisme ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memproduksi **doxa** (kepercayaan yang tidak dipertanyakan) di kalangan warga bahwa *akses ke sumber daya negara bergantung pada hubungan patronase dan keselarasan politik, bukan pada kriteria kebutuhan yang obyektif*. Ketidakberanian warga untuk melaporkan atau memprotes eksklusi ini menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi **logika kekuasaan** dalam Bidang tersebut, di mana protes dianggap sebagai tindakan yang berisiko merugikan diri sendiri di masa depan.

B. Analisis Praktik Sosial Melalui Kerangka Teori Praktik Sosial

Praktik distribusi Bansos adalah hasil dari interaksi dialektis antara struktur internal agen (**Habitus**) dengan struktur eksternal (**Bidang**) melalui upaya akumulasi dan konversi **Modal**.

Habitus Miskin: Disposisi Pasif, Fatalisme, dan Pragmatisme

Habitus adalah sistem disposisi yang diinternalisasi melalui pengalaman hidup, berfungsi sebagai skema generatif yang mengarahkan pikiran, persepsi, dan tindakan agen.

1) Konstruksi Bansos sebagai 'Pemberian' (Hadiah)

Pengalaman hidup yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi yang berulang (ekonomi harian) telah membentuk **Habitus Miskin** di kalangan warga Gubeng. Habitus

ini cenderung memproduksi **disposisi fatalistik** dan **pragmatis**. Disposisi fatalistik tercermin dari pandangan bahwa Bansos dilihat sebagai "*rezeki*" atau "*belas kasihan*", sebuah pemberian yang tidak terduga, alih-alih sebagai hak sosial yang melekat pada status warga negara. Pandangan ini menjauhkan warga dari tuntutan formalistik dan hak-hak sipil yang seharusnya mereka miliki.

Kutipan data seperti "*kami cuma bisa pasrah, kalau dikasih ya syukur, kalau nggak ya sudah, mungkin bukan rezeki kami*" adalah manifestasi dari Habitus ini. Fatalisme semacam ini merupakan respon yang **rasional** terhadap kondisi Bidang yang telah terbukti tidak adil; agen menyadari bahwa menuntut hak secara formal seringkali sia-sia karena tidak memiliki **Modal Simbolik** yang cukup untuk menantang struktur kekuasaan.

2) Keterbatasan Refleksivitas dan Strategi Bertahan Hidup (Coping Mechanism)

Dalam kerangka Bourdieu, **Refleksivitas** merujuk pada kemampuan agen untuk merefleksikan dan mempertanyakan skema Habitus serta aturan Bidang yang berlaku. Pada kasus ini, Habitus miskin menghasilkan **keterbatasan refleksivitas** politik. Warga cenderung tidak mempertanyakan muatan politik dalam Bansos karena fokus utama mereka adalah **pemenuhan kebutuhan mendesak** (strategi bertahan hidup jangka pendek).

Praktik Pragmatis ini adalah sebuah **logika praktis** yang lahir dari kondisi kemiskinan. Mereka melihat pertukaran "Bansos vs. Dukungan" sebagai transaksi yang menguntungkan dalam jangka pendek: mendapatkan sembako sekarang lebih berharga daripada memperjuangkan sistem yang adil di masa depan yang tidak pasti. Mereka menerima *political goods* sambil tetap menjaga **kebebasan elektoral** di bilik suara, meskipun secara simbolik mereka telah terikat. Fenomena ini menunjukkan bahwa warga tidak sepenuhnya pasif, namun **Praktik Sosial** mereka tetap dibatasi oleh Habitus yang terbentuk dalam struktur ketidakadilan.

Modal (Capital) dan Mekanisme Konversi Klientelistik

Analisis praktik distribusi tidak dapat dilepaskan dari peran **Modal** dalam berbagai bentuknya. Praktik klientelisme adalah inti dari proses **konversi modal** dalam Bidang ini.

1) Konversi Modal Ekonomi dan Modal Politik

Bansos pada dasarnya adalah **Modal Ekonomi** yang disalurkan oleh negara. Namun, dalam Bidang Gubeng yang dipolitisasi, modal ini disalurkan melalui filter

Modal Politik dan **Modal Sosial** yang dimiliki oleh aktor perantara.

Modal Politik adalah Aktor politik memanfaatkan posisi mereka (kedekatan dengan struktur kekuasaan atau partai) untuk mengarahkan Bansos, sehingga bantuan tersebut menjadi identik dengan "kebaikan" mereka.

Modal Sosial adalah Jaringan kekerabatan, pertemanan, dan kedekatan emosional di tingkat RT/RW digunakan untuk mengidentifikasi dan memobilisasi penerima manfaat, memperkuat legitimasi aktor perantara di mata komunitas.

Melalui distribusi yang selektif dan simbolis ini, terjadi **Konversi Modal**: Modal Ekonomi negara diubah menjadi **Modal Simbolik** bagi aktor perantara. Modal Simbolik ini berbentuk **otoritas moral** dan **utang budi** di mata warga. Dalam jangka panjang, utang budi ini diharapkan dapat dikonversi kembali menjadi **Modal Politik** (suara) dalam pemilihan umum. Proses ini merupakan siklus penindasan struktural, di mana sumber daya publik diubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.

2) Praktik Klientelisme sebagai Penguatan Doxa

Klientelisme yang terjadi di Gubeng, yang melibatkan pertukaran Bansos dengan loyalitas, telah terinstitusionalisasi dan menjadi bagian dari **Doxa** (kepercayaan yang diterima tanpa pertanyaan) di dalam Bidang. Warga, secara kolektif, cenderung menerima bahwa *"kalau mau dapat bantuan, harus nurut sama yang punya jalur"* atau *"politisasi memang begitu, pasti ada maunya"*.

Penerimaan kolektif terhadap **Praktik Sosial** yang tidak etis ini merupakan bukti keberhasilan aktor perantara dalam menanamkan Doxa politik-patronase. Doxa ini secara efektif meredam potensi **Praktik Perlawanan** (counter-doxa) karena warga merasa bahwa upaya melawan *rules of the game* tersebut hanya akan membawa konsekuensi negatif (misalnya, dikeluarkan dari daftar penerima di masa depan). Dengan demikian, Bansos bukan hanya gagal mengentaskan kemiskinan, tetapi juga **melanggengkan kultur dependensi politik** yang merusak prinsip keadilan sosial.

Konstruksi Budaya "Bansos sebagai Rezeki": Perspektif Sosiologi Budaya

Temuan lapangan terhadap warga seperti Ibu Wakinah dan Bapak Supri menunjukkan bahwa bansos dipersepsikan secara konsisten melalui diksi 'rezeki' atau 'belas kasihan'. Dari sudut pandang sosiologi budaya, narasi ini adalah produk dari relasi patronase yang telah dinormalisasi. Penggunaan simbol-simbol visual seperti stiker kandidat atau pembagian yang dilakukan berdekatan dengan momen politik (Pemilu

2024) menciptakan sebuah *symbolic exchange* (pertukaran simbolik). Masyarakat tidak lagi melihat dirinya sebagai warga negara yang menagih hak kepada negara, melainkan sebagai 'klien' yang berterima kasih kepada 'penderma'. Ini merupakan bentuk kekerasan simbolik di mana ketimpangan dan ketergantungan dianggap sebagai sesuatu yang wajar secara kultural."

Kegagalan Hukum dan Peran Aktor Lokal sebagai Gatekeepers

Eksklusi sistematis terhadap warga miskin (seperti Bapak Adam yang sakit parah namun tak mendapat bantuan) menunjukkan kegagalan hukum dalam menjamin perlindungan sosial. Aktor lokal (RT/RW) dalam hal ini bertindak sebagai *gatekeepers* atau perantara yang memiliki otoritas informal yang kuat. Mereka menggeser logika hukum administratif yang seharusnya berbasis data objektif menjadi logika personalistik atau klientelistik. Hal ini membuktikan bahwa di tingkat lokal, 'hukum yang berlaku' bukanlah apa yang tertulis dalam regulasi kementerian, melainkan kesepakatan-kesepakatan politik informal yang mereproduksi kekuasaan.

C. Kesimpulan Analisis dan Implikasi Sosiologis

Sintesis Praktik Sosial Distribusi Bantuan Sosial di Gubeng

Analisis menggunakan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu mengungkapkan bahwa praktik distribusi bantuan sosial di Kecamatan Gubeng, Surabaya, adalah sebuah **Praktik Sosial yang terdistorsi**. Distorsi ini merupakan hasil dari interaksi dialektis yang kompleks: 1) **Bidang yang Dipolitisasi**: Kondisi kemiskinan struktural menciptakan Bidang yang subur bagi intervensi politik; 2) **Dominasi Modal Politik**: Aktor perantara menggunakan **Modal Politik** dan **Modal Sosial** untuk mengontrol aliran Bansos; dan 3) **Habitus Miskin yang Pragmatis**: Warga penerima manfaat memiliki **Habitus** yang cenderung pasif dan pragmatis, memprioritaskan manfaat jangka pendek di atas perjuangan hak formal.

Inti dari **Praktik Sosial** yang dominan adalah **Klientelisme yang dilembagakan** melalui mekanisme konversi modal. Sumber daya ekonomi negara diubah menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan simbolik dan politik aktor perantara, yang pada akhirnya mengikat warga dalam jaring dependensi.

Implikasi Sosiologis Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi sosiologis yang mendalam terhadap upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan. Pertama, **Kemiskinan Kultural** (dalam bentuk Habitus fatalistik dan pragmatis) dan **Kemiskinan Struktural** (keterbatasan akses ekonomi) saling memperkuat dan dipertahankan oleh **struktur politik-patronase** di tingkat lokal.

Kedua, kebijakan Bansos yang seharusnya menjadi instrumen netral negara untuk mencapai keadilan sosial telah diubah fungsinya menjadi **instrumen politik elektoral**. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam menjaga integritas program kesejahteraan. Perbaikan distribusi Bansos tidak cukup hanya dengan perbaikan data (DTKS), tetapi harus mencakup **reformasi Bidang** itu sendiri, yaitu dengan memotong rantai kontrol Modal Politik dari aktor perantara dan memberdayakan **Modal Simbolik** warga melalui peningkatan **Refleksivitas** politik dan kesadaran hak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kecamatan Gubeng, Surabaya, masih belum tepat sasaran. Masalah utamanya adalah adanya Kesalahan Pengecualian (Exclusion Error), yaitu kegagalan sistem pendataan untuk memasukkan warga yang paling miskin dan rentan ke dalam daftar penerima bantuan. Temuan di lapangan menunjukkan beberapa kelompok rentan yang terlewatkan oleh sistem perlindungan sosial pemerintah, meliputi Keluarga dengan Kerentanan Ganda, Lansia Pekerja Informal, dan Lansia yang Terdampak Politik. Kesalahan penargetan ini menyebabkan warga yang paling membutuhkan perlindungan dasar—terutama jaminan kesehatan gratis dan bantuan pangan—justru tereliminasi dari jaring pengaman sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Bank, W. (2017). *Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia*. World Bank Group.

- Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal Basic Incomes versus Targeted Transfers: Anti-Poverty Programs in Developing Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 201–226.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2021*.
- KPK. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2020: Menjaga Integritas di Masa Pandemi*.
- Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). The Evolution of Cash Transfers in Indonesia: Policy Transfer and National Adaptation. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(2), 425–440.
- Lewis, B. D. (2017). Does Local Government Proliferation Improve Public Service Delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Urban Affairs*, 39(8), 1047–1065.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249.
- Perdana, A. (2014). The Future of Social Welfare Programs in Indonesia: From Fossil-Fuel Subsidies to Better Social Protection. Briefing Note. *Global Subsidies Initiative & International Institute for Sustainable Development*.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345.
- SMERU Research Institute. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: Estimation for Indonesia. *SMERU Working Paper*.
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Bazzi, S. (2008). Indonesia's Social Protection during and after the Crisis. In Barrientos & D. Hulme (Eds.), *Social Protection for the Poor and Poorest* (pp. 121–145). Palgrave Macmillan.
- Tapsell, R. (2021). The Pandemic Paradox in Indonesia: Rising Inequality amid Economic Downturn. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 145–164.
- TNP2K. (2021). Laporan Perkembangan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (SDTKS). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. World Bank Group.